

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN
MELALUI PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA DI DESA KOTABARU
SEBERIDA KECAMATAN KERITANG TAHUN 2015**

Oleh :
Ronal Padli
Email. ronalpadly@ymail.com
Pembimbing :Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5
Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study describes the program Desa Maju Jaya Kotabaru Seberida village belonging to the group of advanced village with a population of 10,856 inhabitants made up of several ethnic groups include Malays, Bugis, Banjar, Java, and toing hua. In line with this diversity becomes an important development focus the attention of either the Development of human government, public services and infrastructure.

The method used adlh qualitative descriptive. This research was conducted in the village of Kotabaru Seberida District of Keritang, with the formulation of the problem What is the success rate of the program Desa Maju Inhil Jaya in Kotabaru village Siberida based on objective and form of development that is loaded in the Regional Regulation No. 5 of 2015 and What are the factors that become obstacles in Program implementation Inhil Maju Jaya village in Kotabaru village Siberida years 2014-2015.

From the research it can be seen that the Strategy of Local Government in development through village programs developed Inhil glorious years in the village Kotabaru Seberida District of Keritang consist of a Strategy to Increase Public Participation, Increased Transparency Government, Improved Economy Village and inhibiting factor in the strategy of local governments in development through program developed village Inhil glorious years in the village Seberida Kotabaru District of Keritang including lack of attention to the Village Infrastructure, Political factors in the Region, social factors and Technology.

Keywords: *Local Government Development Strategy*

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka implemtasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tersebut pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir membuat suatu

program yanag di beri nama Desa Maju Inhil Jaya. Program Desa Maju inhil Jaya adalah suatu program dimana desa diberi otonomi yang luas dalam pelaksanakan pembangunan desa dengan prinsip-

prinsip desentralisasi, keterpaduan, musyawarah, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, akuntebel dan transparan, efektif dan efisien, dan berkelanjutan sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 5 Tahun 2015.

Adapun tujuan utama Program Desa Maju Inhil Jaya adalah:

1. Meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian, pengawasan dan pembangunan Desa;
2. Mewujudkan pembangunan yang partisipatif dengan memberdayakan masyarakat dan sumber daya alam di setiap desa;
3. Meningkatkan akuntabilitas publik terkait keterpaduan perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan;
4. Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi sumber daya desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
5. Menyediakan prasarana sarana pelayanan pemerintahan desa terhadap masyarakat;
6. Menyediakan penghasilan tetap kepala desa dan aparat desa serta insentif atau operasional kelembagaan desa;
7. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar yang di prioritaskan masyarakat;
8. Meningkatkan sinergi pendekatan perencanaan politis, teknokratis, partisipatif, top down dan bottom up;

9. Mendorong dan meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan Desa;
10. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam pengelolaan pembangunan;
11. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga;
12. Menyediakan sarana dan prasana pendukung perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian dan perkebunan;
13. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan dan sosial keagamaan; dan
14. Melakukan sinergi antar program dan sumber pendanaan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada.

Dalam pelaksanaan Program DMIJ desa di kelompokkan menjadi empat kategori atau yang disebut tipologi desa yaitu desa swadaya, desa swasembada, desa swakarya, dan desa maju. Pengelompokan ini mengacu kepada kepadatan penduduk, keadaan alam, letak desa dan kemajuan desa. Mekanisme Program DMIJ secara umum mengikuti sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah dan Program DMIJ diatur melalui Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Operasional.

Melalui program Desa Maju Inhi Jaya Kotabaru Seberida tergolong dalam kelompok desa majudengan jumlah penduduk mencapai 10.856 jiwa terdiri dari beberapa etnis antara lain melayu,

bugis, banjar, jawa, dan toing hua. Sejalan dengan keberagaman ini fokus pembangunan menjadi penting perhatian pemerintah baik itu pembangunan manusia, pelayanan publik dan infrastruktur. Dalam beberapa tahun terakhir Kotabaru Seberida mengalami perkembangan pesat dari sektor ekonomi namun tidak diikuti oleh sektor infrastruktur dan sumber daya manusia. Oleh karena itu penulis melihat penelitian ini penting dilakukan agar strategi pembangunan desa kotabaru melalui program DMIJ lebih terarah sehingga tidak terjadi lagi kesenjangan sosial.

Dalam penjelesan diatas tentunya program desa maju ini dapat memberikan dampak yang positif terhadap proses pembangunan yang terjadi di Desa Kotabaru Seberida. Sehingga peneliti mengambil judul penelitian tentang *Strategi pemerintah daerah dalam pembangunan melalui program desa maju inhil jaya tahun di desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang tahun 2015*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Desa Kotabaru Seberida merupakan salah satu wilayah

Sehingga akan memudahkan penulis untuk memahami dan menganalisis fenomena-fenomena yang ada.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Pemerintah Daerah dalam pembangunan melalui program desa maju inhil jaya tahun di desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang

1. Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan otonomi desa di tandai dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan semakin mampunya pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membawa kondisi masyarakat kearah kehidupan lebih baik. Dengan terselenggaranya otonomi desa maka hal itulah yang menjadi pilar penting otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya otonomi desa. Melalui pengertian tersebut, prinsi utama otonomi desa ialah kewenangan membuat keputusan sendiri melalui keswadayaan yang telah lama dimiliki oleh desa dalam satu kesatuan wilayah pedesaan.

2. Peningkatan Transparansi Pemerintahan

Pendapatan desa adalah sesuatu yang diperoleh oleh desa, untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dengan demikian desa memerlukan sumber pembiayaan untuk

mendukung program-programnya.

3. Peningkatan Perekonomian Desa

Faktor ekonomi dapat dilihat dari dua konteks yaitu secara mikro dan makro, dalam konteks mikro apakah suatu organisasi memiliki dominasi ekonomi tertentu misalnya menguasai produk tertentu, sedang dalam konteks makro apakah ada cara tertentu untuk melakukan kompetisi dalam bidang tertentu misalnya deregulasi. Upaya untuk memperoleh bahan masukan dalam melakukan perencanaan pengelolaan retribusi pasar baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi, maka perubahan struktur ekonomi suatu daerah.

4. Pemberdayaan Petani Desa

Pemberdayaan masyarakat terlebih khusus untuk kelompok tani merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan membentuk dan merubah perilaku masyarakat melalui pengembangan potensi-potensi yang dimiliki. Petani dalam hal ini adalah pelaku utama yang harus diberdayakan. Paradigma strategi pemberdayaan masyarakat petani perlu dirancang dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat petani secara optimal. Orientasi

pemberdayaan masyarakat haruslah membantu sasaran (petani) agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu atau kelompok.

B. Faktor-faktor penghambat dalam Strategi pemerintah daerah dalam pembangunan melalui program desa maju inhil jaya tahun di desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang

1. Kurangnya Perhatian terhadap Infrastruktur Desa

Desa Kotabaru Seberida dikelola oleh Pemerintah Desa sejak otonomi daerah dan dana yang digunakan lebih bersifat swadaya desa itu sendiri, hal ini tampak dari berbagai fasilitas pendukung yang tidak cukup memadai dalam menarik wisatawan lokal. Banyaknya jalan yang dihiasi lubang menjadi faktor penghambat yang cukup serius

2. Faktor Politik di Daerah

Peraturan perundang-undangan tertentu menjadi dasar jalannya suatu organisasi publik. Peraturan perundang undangan bila diberlakukan dapat menghambat atau malah sebaliknya, melonggarkan ruang gerak atau dinamika

kerja dari suatu organisasi publik. Hal ini memang akan sangat tergantung dari siapa yang ada di balik peraturan perundang undangan tersebut. Apakah mereka mementingkan kepentingan umum (publik interes) atau kepentingan yang lain. Inilah yang disebut dengan aspek politik dari analisis lingkungan eksternal.

3. Faktor Sosial dan Teknologi

Faktor sosial dapat berupa perubahan soaial yang ada dalam masyarakat seperti perubahan tingkah laku, sikap, prefensi, kebiasaan, kualitas, jumlah distribusi dan komposisi penduduk. Semua perubahan seperti ini dapat dapat mempengaruhi *supply and demand* dari barang dan jasa yang ada pada organisasi public yang ada di suatu Daerah Sehingga perlu adanya upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam membantu Masyarakat di Desa-Desa di Kabupaten Indragiri Hilir terutama Desa Kotabaru Kecamatan Keritang dalam membantu Ketersediaan dan variasi teknologi sebagai faktor teknologi perlu di analisis karena peranannya dalam membantu proses kerja dari suatu organisasi atau sebaiknya justru mengancam nasib suatu organisasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

a. Strategi Pemerintah Daerah dalam pembangunan melalui program desa maju inhil jaya tahun di desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang terdiri dari :

1. Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat
2. Peningkatan Transparansi Pemerintahan
3. Peningkatan Perekonomian Desa

b. Faktor-faktor penghambat dalam Strategi pemerintah daerah dalam pembangunan melalui program desa maju inhil jaya tahun di desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang:

1. Kurangnya Perhatian terhadap Infrastruktur Desa
2. Faktor Politik di Daerah
3. Faktor social dan Teknologi

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran saran sebagai berikut :

a. Evaluasi kembali program yang sedang dijalankan untuk pengadaan infrastruktur pemerintahan, masyarakat, dan pertanian sebagai media penunjang pemberdayaan kelompok

Masyarakat. Ciptakan pula keadaan yang dapat menghidupkan potensi yang ada pada masyarakat sehingga mereka dapat menyadari potensi mereka, serta perhatikan jalinan komunikasi dengan masyarakat terlebih khusus dengan para Masyarakat yang tergabung dalam lembaga kelompok tani agar dapat memudahkan pemerintah Desa menentukan strategi yang cermat dan tepat untuk kelangsungan program pemberdayaan kelompok tani yang demokratis.

- b. Optimalkan potensi-potensi yang ada didesa terlebih khusus infrastruktur-infrastruktur penunjang kelompok Pembangunan di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang seperti jalan, alat transportasi, alat komunikasi
- c. Perlunya media pendidikan formal maupun non formal bagi masyarakat melalui pergerakan keaktifan lembaga masyarakat yang sempat terhenti, sehingga kegiatan tersebut dapat menjadi jembatan bagi pemerintah juga untuk memberikan pembinaan dan bimbingan yang konsisten, berkelanjutan serta tepat sasaran kepada masyarakat dengan selalu melibatkan mereka yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan

serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. dalam kegiatan tersebut.

- d. Pentingnya komunikasi secara intensif, dengan terjun langsung kelapangan untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat yang keberadaannya mulai tidak aktif, ciptakan suasana kekeluargaan dengan mereka agar supaya perasaan kecewa yang dirasakan dapat terobati dengan sikap kepedulian yang ditunjukkan oleh Pemerintah Desa terhadap perkembangan kelompok dimasyarakat secara berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta.
- Agus Salim, *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, (Yogyakarta, Tiara Wacana), 2002.
- Ahmadi, A. Uhbiyati, N. (2001). *Ilmu Pendidikan*. Jakarata : Rineka Cipta

- Dharma S.S, 2004, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT. Djamatan.
- Drs. Soetomo, Masalah Sosial dan Pembangunan, Pustaka Jaya, Jakarta,
- Hamid Patilima. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Hasibuan, 2000, *Pelimpahan Wewenang*, jakarta: PT. Bumi Aksara.
- HAW. Widjaja.2002, *Otonomi daerah dan daerah otonom*, Jakarta :PT Raja Grafindo Pustaka.
- Ishak. 2010. *Posisi Politik Masyarakat Dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Penaku.
- Laurer Robert H. , *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Rineka Cipta: Jakarta)
- Lexi, J. Meleong. (1991 dan 2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Arif Nasution. 2000. *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, Jakarta: Mandar Maju.
- Koentjraningrat(ed).1988. *Metode-metode Penelitian Masyarakat* Jakarta: Gramedia.
- Koswara, 2003, *Pokok-Pokok Kuliah Teori Pemerintahan Daerah*, Program Pasca Sarjana MIP, Jakarta.
- Ramlan Subakti.1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Sarifudin Hidayat, (2002). *Metodelogi Penelitian*.Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P Siagian, (1982). *Pengawasan Melekat di Lingkungan Pemerintahan*. Jakarta : Erlangga.
- Sukanto.(2002). *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*.Yogyakarta: Andi.
- Suparno, A.Suhaenah. 2001. *Membangun Kompetensi Belajar. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi: Departemen Pendidikan Nasional*
- Tangkilisan. 2003. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Lukman Offset.
- Taliziduhu Ndraha, 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Winardi.1979. *Azas-Azas Manajemen*, Alumni Bandung: Bandung
- Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2015